

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK HARTA BENDA SANDRA DEWI PASCA KASUS KORUPSI HARVEY MOEIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Oleh
Gan Godsend
NIM. 2205040100

ABSTRAK

Kasus penyitaan harta benda dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Harvey Moeis menimbulkan permasalahan hukum mengenai kedudukan harta benda pasangan yang tidak terlibat dalam tindak pidana serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak kebendaan berdasarkan hukum perdata. Permasalahan ini penting dikaji karena penyitaan aset pasangan pelaku tindak pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan harta serta perlindungan terhadap hak pasangan yang tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum harta benda dalam perkawinan antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis menurut hukum perdata serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda pasangan yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dianalisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, harta yang menjadi objek penyitaan dalam perkara Harvey Moeis berkedudukan sebagai harta Bersama, Kesimpulan tersebut diperkuat oleh pencabutan gugatan keberatan oleh Sandra Dewi, sehingga penyitaan aset tetap berlaku sesuai putusan pidana. Perlindungan hukum terhadap pasangan yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi diwujudkan melalui penentuan status hukum harta berdasarkan ketentuan hukum perdata serta mekanisme keberatan pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perdata memberikan kepastian hukum, perlindungan hak kebendaan, dan kepastian status kepemilikan harta melalui pengaturan normatif yang berlaku serta menjamin keseimbangan antara perlindungan hak pasangan dan kepentingan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara adil, proporsional, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Harta Bersama, Perlindungan Hukum, Hak Kebendaan, Hukum Perdata.

LEGAL ANALYSIS OF THE PROTECTION OF SANDRA DEWI'S PROPERTY RIGHTS AFTER THE HARVEY MOEIS CORRUPTION CASE FROM A CIVIL LAW PERSPECTIVE

***By
Gan Godsend
NIM. 2205040100***

ABSTRACT

The case of confiscation of assets in a corruption case involving Harvey Moeis raises legal issues regarding the status of the assets of the spouse who is not involved in the crime and the form of legal protection for property rights under civil law. This problem is important to study because the confiscation of assets of the spouse who committed the crime has the potential to create legal uncertainty regarding the status of property ownership and the protection of the rights of the spouse who is not proven to be involved in the crime. This study aims to analyze the legal status of assets in the marriage between Sandra Dewi and Harvey Moeis according to civil law and to analyze the form of legal protection for the assets of the spouse who is not involved in the crime of corruption. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials analyzed through literature studies. The results of the study indicate that based on the provisions of the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as well as the legal facts revealed in the trial, the assets that are the object of confiscation in the Harvey Moeis case are considered joint assets. This conclusion is strengthened by the withdrawal of the objection lawsuit by Sandra Dewi, so that the confiscation of assets remains valid according to the criminal decision. Legal protection for couples who are not involved in criminal acts of corruption is realized through determining the legal status of assets based on civil law provisions and the objection mechanism for third parties in good faith as regulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2022. Thus, this study concludes that civil law provides legal certainty, protection of property rights, and certainty of property ownership status through applicable normative regulations and ensures a balance between the protection of spouses' rights and the interests of the state in eradicating criminal acts of corruption in a fair, proportional, and sustainable manner.

Keywords: *Legal Status, Joint Property, Legal Protection, Property Rights, Civil Law.*